

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan didirikan untuk mengoptimalkan keuntungan agar perusahaan dapat menjaga keberlanjutan usahanya (Maskat, 2018). Guna menjaga keberlanjutan usaha tersebut, perusahaan seringkali menyebabkan permasalahan terhadap lingkungan. Dampak yang disebabkan oleh perusahaan ini berupa dampak negatif dan positif (Uzelac et al., 2022). Dampak positif yang dihasilkan oleh perusahaan meliputi penciptaan lapangan kerja, penyediaan produk yang diperlukan oleh masyarakat sebagai konsumsi, peningkatan pendapatan, serta kontribusi terhadap pendapatan daerah dan negara, yang secara keseluruhan berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, dampak positif tersebut seringkali disertai dengan dampak negatif, seperti terjadinya pencemaran lingkungan yang meliputi tanah, air, dan udara (Haholongan, 2016). Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan dampak negatif yang dihasilkan dari aktivitas operasionalnya sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Aspek ini menjadi krusial dalam rangka menjaga terciptanya iklim usaha yang sehat, sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pemangku kepentingan serta keberlanjutan lingkungan (Sayidah, 2017). Selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, pemerintah mendorong setiap perusahaan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial. Program tersebut difokuskan pada berbagai isu strategis, antara lain penanggulangan pencemaran lingkungan, pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta upaya penurunan angka pengangguran (Garaika, 2020).

Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Governance) saat ini telah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan di Indonesia.

Regulasi mengenai pengungkapan program CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74. Jeong et al., (2018) berpendapat bahwa perusahaan perlu secara konsisten melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai upaya dalam mengoptimalkan efektivitas bisnis dan kepercayaan pemangku kepentingan dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Pengungkapan tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan dan selaras terhadap capaian yang telah ditentukan oleh perusahaan. Capaian perusahaan meliputi berbagai aspek, antara lain pengembangan sumber daya manusia secara kompeten, pelestarian dan perlindungan lingkungan, pengentasan tingkat kemiskinan, penerapan tata kelola perusahaan secara transparan dan akuntabel, serta membangun dan mempertahankan relasi yang sinergis dengan pihak-pihak berkepentingan (Retnaningsih, 2015).

Kebutuhan informasi mengenai performa dan kewajiban sosial perusahaan merupakan hal esensial bagi para pemangku kepentingan untuk memantau kemajuan operasional perusahaan secara berkelanjutan (Fatmawatie, 2017). Semua informasi yang diperlukan akan disajikan dalam bentuk laporan yang kini dikenal sebagai laporan keberlanjutan. Pelaporan keberlanjutan mencakup aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kebijakan ekonomi, dengan demikian laporan tersebut tidak sama dengan laporan CSR yang biasanya terdapat dalam laporan tahunan perusahaan dan hanya memuat aspek lingkungan serta sosial saja (Arfamaini, 2016). Pelaporan keberlanjutan adalah bentuk laporan yang mencakup data keuangan maupun non-keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan, yang meliputi data terkait tiga aspek utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial (Dewi & Sudana, 2015). Konsep awal dari pelaporan berkelanjutan diperoleh berdasarkan konsep dasar Triple Bottom Line yaitu konsep turunan dari pembangunan berkelanjutan (Richardson, 2013). Perkembangan berkelanjutan menjelaskan bahwa pembangunan yang dilakukan pada masa kini harus mampu memfasilitasi

pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam menjaga kapasitas mereka di masa mendatang (Ferawati, 2018). Perkembangan berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting karena pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan manusia pada saat tertentu akan mengalami kehancuran ekosistem secara global (Segera, 2015).

Pengungkapan sosial, lingkungan dan ekonomi dalam pelaporan berkelanjutan dapat menaikkan tingkat transparansi mengenai dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial perlu diidentifikasi agar perusahaan dapat memahami tingkat risiko yang mungkin dihadapi dalam operasionalnya (Dewi & Sudana, 2015). Luke & Adaramola, (2013) menyatakan hal yang sejalan mengenai pentingnya pengungkapan 3P (people, profit, planet) dalam pelaporan berkelanjutan, adanya pengungkapan tersebut dapat meningkatkan transparansi atas dampak yang ditimbulkan dari aktivitas ekonomi, lingkungan, dan sosial, sehingga dipertimbangkan bagi para pemangku kepentingan dalam menilai kinerja dan tanggung jawab perusahaan. Pengungkapan pelaporan berkelanjutan dapat memberikan sinyal positif maupun sinyal negatif bagi para pengguna informasi keuangan dari perusahaan tersebut (Dewi & Sudana, 2015). Apabila informasi yang diperoleh bernilai positif, maka investor cenderung memberikan respons yang positif pula. Hal ini memungkinkan investor dalam mengidentifikasi perbedaan antara perusahaan yang memiliki kualitas baik dengan perusahaan yang kurang berkualitas. Diperolehnya informasi bernilai positif tersebut yang kemudian berdampak pada peningkatan harga saham perusahaan tersebut (Pratama & Marsono, 2021).

Pelaksanaan usaha tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia masih belum mendapatkan kesadaran yang memadai, hal ini tercermin dari jumlah perusahaan yang berhasil meraih penghargaan nilai emas dalam *Public Disclosure*

Program yang relatif sedikit, sementara jumlah perusahaan dengan nilai merah justru mengalami peningkatan (Jurnali & Manurung, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa intensitas atas pelaksanaan tanggung jawab sosial pada perusahaan masih relatif berada pada tingkat implementasi minimum dan belum dijalankan secara optimal. Peristiwa tersebut juga mengindikasikan dari banyaknya perusahaan yang belum mempraktekkan kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial, hal tersebut terjadi karena mereka menganggap bahwa pelaksanaan tanggung jawab pada perusahaan akan menimbulkan pengeluaran secara signifikan, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan pengeluaran dan mengurangi pemasukan pada perusahaan (Eriandani & Kuswanto, 2016). Pelaksanaan dari tanggung jawab sosial pada suatu perusahaan mungkin tidak memberikan keuntungan finansial secara langsung dalam jangka pendek. Namun, dalam perspektif jangka waktu yang panjang, implementasi tanggung jawab perusahaan dapat berpotensi menciptakan nilai tambah bagi perusahaan melalui kontribusi finansial yang bersifat langsung maupun tidak langsung (Fatmawatie, 2017). Pemerintah memiliki peran dalam membagikan penghargaan terhadap perusahaan yang telah secara konsisten melaksanakan pengungkapan tanggung jawab sosial, serta mempublikasikan nama-nama perusahaan tersebut guna meningkatkan kesadaran publik (Jurnali & Manurung, 2023).

Penghargaan tahunan yang diberikan atas pelaporan keberlanjutan di Indonesia dikenal dengan sebutan Indonesia Sustainability Reporting Award. Penghargaan ini diserahkan terhadap perusahaan yang menyusun laporan mengenai segala aktivitas yang berkaitan dengan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, dengan tujuan menjaga keberlanjutan perusahaan tersebut. Dalam beberapa tahun belakangan, telah terjadi kenaikan signifikan pada pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Hal tersebut tercermin dari prestasi Indonesia yang mendapat peringkat tertinggi di antara 27 negara dalam hal keyakinan masyarakat kepada transparansi

informasi dalam pelaporan keberlanjutan, berdasarkan tinjauan GlobeScan dan Global Reporting Initiative pada tahun 2020. Pencapaian tersebut juga menjadi indikator bahwa sebagian besar perusahaan di Indonesia telah melaksanakan pelaporan yang mengacu pada ketentuan standar pengungkapan ketiga aspek utama pembangunan berkelanjutan.

Peningkatan pelaksanaan pelaporan keberlanjutan juga dipengaruhi oleh tuntutan yang semakin mengemuka di berbagai lapisan masyarakat, khususnya terkait isu *Green Concern* dan *Social Concern* (Nuraeni & Darsono, 2020). Isu “*Green Concern*” dan “*Social Concern*” ini terkait dengan berbagai macam kasus pencemaran lingkungan bagi kehidupan sosial manusia (Nuraeni & Darsono, 2020). Beberapa contoh peristiwa pencemaran lingkungan di Indonesia yang pernah terjadi melibatkan sejumlah perusahaan besar. PT Timah Tbk. di Pulau Bangka Belitung, misalnya, dikaitkan dengan aktivitas penambangan timah inkonvensional yang dilakukan oleh masyarakat tanpa izin, sebagai akibat dari tekanan untuk memenuhi target setoran. PT Freeport Indonesia menghadapi isu lingkungan terkait dengan pembuangan sejumlah limbah dalam kapasitas besar yang menyebabkan Danau Wanagon mengalami jebol sebanyak tiga kali. Sementara itu, PT Lapindo Brantas Inc. dianggap bertanggung jawab atas insiden semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo, yang terjadi akibat kelalaian dalam pengelolaan kegiatan eksplorasi (Anatan, 2010).

Perkembangan penelitian telah banyak yang menguji determinan dari laporan berkelanjutan. Dwiyani & Muslim, (2022) yang membahas pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari struktur kepemilikan terhadap pengungkapan pelaporan berkelanjutan. (Sutawan & Sisdyani, 2022) juga menjelaskan bahwa struktur kepemilikan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan.

Kumar (et al., 2022) menyatakan bahwa struktur kepemilikan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan berkelanjutan. Haider & Nishitani (2022) yang dilakukan dengan menggunakan sampel dari beberapa perusahaan yang terdaftar pada TSE (Tokyo Stock Exchange) dengan kriteria perusahaan berbasis struktur kepemilikan institusi. Temuan pada penelitian ini mengindikasikan bahwa mekanisme struktur kepemilikan memberikan pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan.

Adanya perbedaan hasil dari beberapa penelitian diatas disebabkan oleh fenomena yang belum ditangkap. Penelitian ini menggunakan struktur kepemilikan yang memiliki fungsi menjadi variabel independen dengan tata kelola perusahaan yang baik berperan untuk variabel mediasi. Perusahaan dapat diasumsikan telah mengimplementasikan prinsip tata kelola perusahaan apabila telah menggunakan struktur kepemilikan. Berdasarkan teori pemangku kepentingan, perusahaan diharapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi para pemangku kepentingan (Octoviany, 2020). Informasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan ini dapat berupa pengungkapan laporan keberlanjutan. Penelitian ini diharapkan sejalan dengan Ardiani et al., (2022) yang mengungkapkan bahwa penerapan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik akan mendorong pengungkapan laporan keberlanjutan menjadi lebih baik.

Penelitian lainnya yang menggunakan topik keberagaman dewan sebagai variabel pada pengungkapan laporan berkelanjutan oleh Musa et al. (2020) yang menggunakan sampel dari beberapa perusahaan di Nigeria yang terdaftar pada Nigerian Stock Exchange memperoleh hasil negatif signifikan. Penelitian lain oleh Adeniyi & Fadipe (2018) juga menyatakan bahwa keberagaman dewan memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pengungkapan pelaporan berkelanjutan.

Buallay et al., (2022) menyatakan bahwa adanya perbedaan dewan

khususnya pada gender memberikan hasil positif yang signifikan terhadap pengungkapan pelaporan berkelanjutan. Cicchiello et al., (2021) membahas mengenai keberagaman gender pada dewan dengan adanya ras asia dan afrika. Sampel yang digunakan berasal dari beberapa perusahaan asia dan afrika yang mempublikasi laporan berkelanjutan pada tahun 2017. Temuan penelitian yang diperoleh adalah positif dan signifikan.

Perbedaan hasil penelitian sebelumnya dapat terjadi karena ada fenomena yang belum tertangkap. Berdasarkan teori pemangku kepentingan yang menjelaskan bahwa perusahaan harus memberikan senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Perusahaan diharapkan untuk memberikan informasi tentang hal-hal seperti kinerja keuangan maupun pengungkapan pelaporan berkelanjutan. Tata kelola perusahaan memiliki prinsip dasar berupa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Kusumastuti (2008) menjelaskan bahwa keberagaman gender dewan pada perusahaan, yaitu wanita memiliki lebih teliti dan memiliki resiko yang rendah dalam membuat laporan. Penelitian ini menunjukkan keselarasan dengan Novita (2020) yang mengungkapkan bahwa keberagaman gender terbukti memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan berkelanjutan. Kehadiran perempuan dalam struktur dewan direksi diyakini dapat menghadirkan sudut pandang yang berbeda, sehingga memengaruhi cara perusahaan memahami dan merespons isu-isu terkait berkelanjutan.

Sutawan & Sisdyani (2022) menyatakan adanya koneksi politik pada perusahaan memiliki pengaruh yang bersifat positif pada pengungkapan pelaporan berkelanjutan. Pernyataan itu mengindikasikan keterkaitan kuat suatu politik pada suatu perusahaan, maka tingkat pengungkapan laporan berkelanjutan yang dilakukan cenderung tinggi. Tingginya tingkat koneksi politik pada suatu perusahaan umumnya berhubungan erat dengan meningkatnya kebutuhan untuk menjaga

reputasi perusahaan di hadapan publik dan para pemangku kepentingan. Wardah & Nugrahaningsih (2020) dengan menggunakan uji statistik menyatakan koneksi politik yang bersumber dari latar belakang politik dewan komisaris dan direksi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan.

Inkonsistensi tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya fenomena yang belum tertangkap pada penelitian sebelumnya. Simanjuntak & Prabowo (2021) memaparkan adanya koneksi politik pada sebuah perusahaan dapat mempengaruhi tingkat transparansi yang rendah. Rendahnya tingkat transparansi tersebut sangat bertolak belakang terhadap prinsip tata kelola perusahaan, yakni transparan. Berdasarkan perspektif dari teori pemangku kepentingan yang menyatakan bahwa perusahaan merupakan entitas yang tidak semata-mata beroperasi demi kepentingan internal atau keuntungan finansial, melainkan juga memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi dan manfaat bagi para pemangku kepentingan yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung (Harmoni, 2013). Sejalan dengan teori ini, dalam praktik dan pengungkapan pelaporan berkelanjutan diperlukan adanya prinsip dari Tata kelola perusahaan yang baik yang salah satunya menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan dari para pemangku kepentingan. Aziz (2014) menambahkan bahwa praktik dan pengungkapan pelaporan berkelanjutan penerapan konsep serta mekanisme tata kelola perusahaan yang baik dengan salah satu prinsip utamanya yaitu menekankan pentingnya perhatian terhadap kepentingan para pemangku kepentingan. Perusahaan diharapkan untuk mematuhi regulasi yang berlaku dan membangun hubungan kerja sama yang aktif dengan para pemangku kepentingan guna mendukung keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan, penelitian ini berupaya menjawab adanya inkonsistensi dari beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dimungkinkan

terjadi karena adanya fenomena yang belum tertangkap. Penelitian ini mengelaborasi perspektif teori pemangku kepentingan yang ditangkap pada variabel Tata Kelola Perusahaan untuk menjelaskan hubungan antara Struktur Kepemilikan, Keberagaman Dewan, dan Koneksi Politik terhadap pengungkapan dari Pelaporan Berkelanjutan. Penelitian ini juga berupaya untuk menginvestigasi efek mediasi tata kelola perusahaan pada hubungan Struktur Kepemilikan, Keberagaman Dewan, dan Koneksi Politik terhadap pengungkapan dari laporan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada bagian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap pelaporan berkelanjutan?
2. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap pelaporan berkelanjutan?
3. Apakah keberagaman dewan berpengaruh terhadap pelaporan berkelanjutan?
4. Apakah tata kelola perusahaan memediasi pengaruh struktur kepemilikan terhadap pelaporan berkelanjutan?
5. Apakah tata kelola perusahaan memediasi pengaruh keberagaman dewan terhadap pelaporan berkelanjutan?
6. Apakah tata kelola perusahaan memediasi pengaruh Koneksi Politik terhadap pelaporan berkelanjutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan memiliki pengaruh terhadap pelaporan berkelanjutan.
2. Untuk menguji pengaruh koneksi politik memiliki pengaruh terhadap pelaporan berkelanjutan.

3. Untuk menguji pengaruh keberagaman dewan memiliki pengaruh terhadap pelaporan berkelanjutan.
4. Untuk menguji pengaruh mediasi tata kelola perusahaan sebagai pemediasi terhadap hubungan struktur kepemilikan terhadap pelaporan berkelanjutan.
5. Untuk menguji pengaruh mediasi tata kelola perusahaan sebagai pemediasi terhadap hubungan keberagaman dewan terhadap pelaporan berkelanjutan.
6. Untuk menguji pengaruh mediasi tata kelola perusahaan sebagai pemediasi terhadap hubungan koneksi politik terhadap pelaporan berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun empiris sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Teori pemangku kepentingan yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bahwa perusahaan juga harus memberikan manfaat bagi para pemegang kepentingannya. Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan para pemegang kepentingan sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Prinsip tata kelola perusahaan secara baik diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pembuatan laporan perusahaan yang transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. Salah satu cara yang digunakan agar mendapat dukungan dari para pemegang kepentingan adalah dengan melaporkan pengungkapan sosial. Teori pemangku kepentingan diharapkan dapat menjadi salah satu pedoman bagi perusahaan untuk mendapat dukungan dari pemegang kepentingan dengan melaporkan pelaporan berkelanjutan.

1.4.2 Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk mempertimbangkan peran tata kelola perusahaan dalam mendorong pelaporan berkelanjutan. Lebih dari itu temuan pada

penelitian ini juga dapat digunakan oleh investor untuk mempertimbangkan dampak struktur kepemilikan, keberagaman dewan, dan koneksi politik terhadap pengungkapan pelaporan keberlanjutan.

1.4.3 Manfaat Praktis

Untuk regulator dan manajemen, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan mengenai tata kelola perusahaan digunakan sebagai variabel mediasi yang diharapkan dapat mencari adanya hubungan dari struktur kepemilikan, keberagaman gender dewan direksi, dan koneksi politik pada pengungkapan pelaporan berkelanjutan.